

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BIRO HUKUM	Nomor SOP	: KP2MI/BP2MI-05.02/CFM.01/SOP.01/02.04/01
	Tanggal Pembuatan	: 9 Desember 2025
	No & Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 9 Desember 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Biro Hukum Wahyudi Putra, S.H. NIP. 197908072005011002
	Nama SOP	: INVENTARISIR KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN JDIH
Dasar Hukum - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; - Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; - Melakukan evaluasi pengembangan JDIH - Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional; - Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; - Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;	Kualifikasi Pelaksana - Memahami tugas dan fungsi KP2MI/BP2MI; - Memahami Peraturan dan perundangan-undangan terkait Penempatan & pelindungan Pekerja Migran Indonesia; - Memiliki kemampuan mengolah dan mengelola data/bahan dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik; - Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi; - Memiliki kemampuan analisis hukum.	
Keterkaitan - SOP Makro Pengembangan JDIH - SOP Makro Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya	Peralatan/Perlengkapan - Alat tulis kantor; - Komputer, printer dan scanner; - Jaringan internet; - Lembar kerja/ Rencana Kerja dan Anggaran.	
Peringatan Jika SOP Inventarisir Kebutuhan dan Pengembangan JDIH ini tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh pada kinerja KP2MI/BP2MI.	Pencatatan dan Pendataan Pencatatan dan pendataan dilakukan di media soft copy (elektronik) dan hard copy (salinan keras).	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO



KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BIRO HUKUM

Nomor SOP : KP2MI/BP2MI-05.02/CFM.01/SOP.01/02.04/01	Tanggal Pembuatan : 9 Desember 2025
Nama SOP : INVENTARISIR KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN JDIH	No & Tanggal Revisi : -
	Tanggal Efektif : 9 Desember 2025

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Biro Hukum	Ketua Tim	Anggota Tim/Jabatan Fungsional	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan untuk dilakukan inventarisasi kebutuhan pengelolaan dan pengembangan JDIH				Disposisi melakukan inventarisasi kebutuhan pengelolaan dan pengembangan JDIH	1HK	Surat disposisi inventarisasi kebutuhan pengelolaan dan pengembangan JDIH	
2.	Melakukan inventarisasi kebutuhan pengelolaan dan pengembangan JDIH				Surat disposisi inventarisasi kebutuhan pengelolaan dan pengembangan JDIH	5HK	Hasil inventarisasi kebutuhan pengelolaan dan pengembangan JDIH	
3.	Mengumpulkan dan menganalisis data kebutuhan pengembangan JDIH				Hasil inventarisasi kebutuhan pengelolaan dan pengembangan JDIH	3HK	Kumpulan data pengelolaan dan pengembangan JDIH	Masukan Tim IT dan Masukan BPHN
4.	Merumuskan dan menyetujui rencana pengembangan JDIH	Tidak 	Ya 		Kumpulan bahan pengelolaan dan pengembangan JDIH	2HK	Surat persetujuan untuk dilakukan pengembangan JDIH	
5.	Mengimplementasikan pengembangan JDIH				Surat persetujuan untuk dilakukan pengembangan JDIH	60HK	Website JDIH yang telah dikembangkan content dan fiturnya	dapat dilakukan dengan Vendor
6.	Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil inventarisasi dan pengembangan JDIH				Website JDIH yang telah dikembangkan content dan fiturnya	2HK	Hasil evaluasi dan laporan inventarisasi dan pengembangan JDIH	Laporan kepada pihak BPHN dilaksanakan per tahun
7.	Memerintahkan untuk mendokumentasikan hasil inventarisasi dan pengembangan JDIH				Hasil evaluasi dan laporan inventarisasi dan pengembangan JDIH	2HK	Disposisi memerintahkan untuk mendokumentasikan hasil inventarisasi dan pengembangan JDIH	
8.	Mendokumentasikan hasil inventarisasi dan pengembangan JDIH				Disposisi memerintahkan untuk mendokumentasikan hasil inventarisasi dan pengembangan JDIH	1HK	Dokumentasi hasil inventarisasi dan pengembangan JDIH	